



## Proceeding

International Conference on Islamic Educational Guidance and Counseling

28 Juli 2022

E-ISSN: 2827-9581

Website: <http://conference.iainsalatiga.ac.id/index.php/iciegc>

**ICIEGC**

Hlm. 1-15

### **PERSPEKTIF INKLUSI SOSIAL GURU BK DI KOTA BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN (KAJIAN AWAL TENTANG BIMBINGAN DAN KONSELING BERPERSPEKTIF INKLUSIVITAS SOSIAL)**

**Helma Nuraini<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> UIN Antasari Banjarmasin

---

#### **Informasi Artikel**

##### *Penulis Korespondensi:*

Helma Nuraini,

Email: [helmanuraini@uin-antasari.ac.id](mailto:helmanuraini@uin-antasari.ac.id)

---

#### **ABSTRACT**

Guidance and Counseling (Bimbingan dan Konseling or BK) in education should be oriented to the needs of the counselee, yet the biased perspective of counselor. BK teachers must have an emic concept leading to social inclusion perspectives and multicultural competence. This study aims to describe the perspective of the social inclusion of BK teachers in Banjarmasin. The research subjects were 62 BK teachers. The data was obtained through an online questionnaire. The results showed that discourse of social inclusiveness was still rare, in fact almost 80% of the subjects were unsocialized. The subject knowledge is limited to theoretical and normative aspects. Subjects believe that the principle of inclusion must be applied to minorities, however almost all subjects stand up to the majority group. Individuals are considered to conform to the norms and to the authorities. BK teachers in Banjarmasin are still dominated by an exclusive perspective viewing women, children and minority groups. This comes from a belief system and biased values that come from aspects of religion and socialization obtained from and values and culture in society. This shows that there are still inconsistencies between knowledge and perspective, between values and attitudes, between theory and practice.

---

**Keyword:** Guidance and counseling; social inclusion perspectives; counselor

---

#### **ABSTRAK**

Bimbingan dan Konseling (BK) harusnya berorientasi pada kebutuhan konseli, bukan perspektif konselor yang berpotensi bias. Agar layanan BK mampu berperan maksimal, maka pertimbangan unsur emik, perspektif inklusi sosial dan penguatan kompetensi multikultural guru BK harus dikedepankan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif inklusi sosial guru BK di Kota Banjarmasin. Subjek penelitian yaitu 62 orang guru BK. Data primer didapat melalui kuesioner yang diberikan secara daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan sosialisasi mengenai inklusivitas sosial masih jarang didapatkan, bahkan hampir 80 % subjek belum mengenal atau memahami permasalahan tersebut. Perspektif Inklusivitas Sosial subjek terbatas pada aspek teoretis dan normatif. Subjek meyakini bahwa prinsip inklusi harus diterapkan dan kelompok minoritas harus mendapatkan hak yang setara dan adil. Di sisi lain, hampir semua subjek masih berpihak pada kelompok mayoritas, individu dianggap harus menyesuaikan diri dengan norma dan menyesuaikan diri dengan pihak otoritas. Guru BK di Banjarmasin masih didominasi oleh perspektif eksklusif. dalam memandang perempuan, anak dan kelompok minoritas. Hal tersebut

---

berasal dari sistem keyakinan dan nilai-nilai bias yang bersumber dari aspek agama dan sosialisasi yang didapatkan dari dan nilai-nilai dan budaya di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan antara pengetahuan dan perspektif, antara nilai dan sikap, antara teori dan praktik.

---

**Kata kunci:** Bimbingan dan konseling; perspektif inklusi sosial; konselor

---

## PENDAHULUAN

Konseling yaitu aktivitas dan pekerjaan yang lahir dari kebutuhan masyarakat Barat untuk mengatasi masalah individu dalam menghadapi kehidupan yang makin kompleks. Institusi sosial kolektif tidak lagi mencukupi kebutuhan individu untuk memecahkan persoalan pribadi. Menurut McLeod (2008) individu lebih memilih melakukan konseling karena konselor tidak akan menyalahkan, bersedia mendengarkan dengan baik dan bekerja sama untuk memahami dan memecahkan masalah konseli.

Perkembangan konseling dari aspek teori, praktik hingga pada pembentukan asosiasi profesi akan masih terus berkembang. Perubahan paradigma, dominasi *school of thought* dan pendekatan-pendekatan baru dari berbagai perspektif akan terus berlangsung. Di sisi lain, definisi-definisi konseling yang dibuat oleh para *scholar* masih dibingkai dari sudut pandang konselor (McLeod, 2008). Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan konseling yang seharusnya berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan konseli sebagai subjek yang akan dibantu, dimandirikan dan diberdayakan.

Konseling merupakan profesi pada ranah *human service*. Seorang konselor akan memberikan bantuan secara profesional pada konseli dalam rangka mencapai pemahaman diri, mengubah cara pandang yang lebih efektif, memerjelas visi dan misi hidup serta memberikan alternatif bagi pilihan-pilihan hidup konseli. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, seorang konselor harus (1) memahami kompleksitas interaksi individu-lingkungan dalam konteks sosial budaya, (2) menguasai ragam bentuk intervensi psikologis baik inter maupun antar pribadi dan lintas budaya, (3) menguasai strategi asesmen lingkungan dalam kaitannya dengan keberfungsian psikologis, dan (4) memahami proses perkembangan manusia (Kartadinata, 2011)

Dalam kelintasbudayaan terdapat adanya kesenjangan yang cukup besar antara konteks dunia Barat yang mendominasi perspektif dalam pelaksanaan konseling di Indonesia. Hal ini berdampak pada pengabaian keunikan budaya yang dimiliki konseli. Pendekatan konseling yang awalnya berpandangan etik, haruslah mengadopsi pandangan etik yang menghargai adanya keragaman budaya minor, latar belakang etnis, kelompok

sosial rentan seperti pada kelompok difabel dan perempuan. Pada kelompok yang telah disebutkan di atas, terdapat kebutuhan khusus yang perlu difasilitasi melalui perspektif inklusi sosial.

Pendidikan sebagai hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal 30 UUD 1945 mensyaratkan keadilan dan kesetaraan bagi semua individu tanpa terkecuali. Untuk dapat mencapai kondisi di atas, prinsip inklusi sosial harus menjadi bagian dari praktik pendidikan. Sekolah perlu memastikan bahwa (1) apakah semua peserta didik tanpa terkecuali mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan berbagai sumber daya yang diperlukan bagi kegiatan pembelajaran dan perkembangan aspek psikologisnya, (2) apakah semua peserta didik mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan yang menjadi minat atau haknya (3) apakah semua peserta didik tidak mengalami hambatan apa pun dan dari mana pun untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dan (4) apakah semua peserta didik memiliki dan diberikan kesempatan untuk melakukan kontrol terhadap informasi, fasilitas, hak dan kewajiban dan sebagainya yang menyangkut dirinya. hak dan kewajiban semua peserta didik tanpa terkecuali.

The World Bank, mendefinisikan inklusi sosial sebagai proses pelibatan individu dan kelompok yang selama ini dirugikan dikarenakan identitas mereka, untuk berperan serta pada masyarakat melalui perbaikan kemampuan, kesempatan dan martabat. Inklusi sosial berusaha menjamin kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan bahwa mereka menikmati akses yang sama tanpa ada perbedaan apapun ([www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)).

Ra'is (2017) menjelaskan hasil penelitian dari oleh Silver dari *Brown University* yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok yang tereksklusi di Indonesia mendapat hambatan dalam mendapatkan identitas legal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), berpartisipasi dalam ekonomi, mengakses layanan kesehatan dasar, mengakses layanan pendidikan dasar, berinteraksi dengan masyarakat dan kesempatan untuk berperan dalam masyarakat.

Persoalan inklusivitas juga telah menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sejak tahun 2000an. Pengembangan sekolah dengan sistem terpadu melahirkan sekolah-sekolah dan kelas-kelas inklusi pada setiap jenjang pendidikan. Konsep sekolah ramah anak, gerakan sekolah menyenangkan dan berbagai konsep yang mengarusutamakan kelompok marginal dan difabel tentu saja menuntut layanan Bimbingan dan Konseling dengan perspektif inklusivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengetahuan dan sikap guru BK di Kalimantan Selatan terkait perspektif inklusivitas dalam konteks layanan BK.

Perspektif inklusi akan menumbuhkan sikap inklusif, suatu awal dari tindakan individu yang berusaha untuk memposisikan dirinya ke posisi yang sama. Konselor perlu untuk memahami orang atau kelompok dengan orang lain dengan tujuan menyelesaikan permasalahan konseli. Inklusivitas sebagai lawan dari eksklusivitas, bermakna menyempitkan kesenjangan sosial, dan mau berusaha untuk mengerti semua sudut pandang yang dimiliki oleh orang lain (Kertati, 2020)

Konseling dalam seting pendidikan yang lebih dikenal dengan istilah Bimbingan dan Konseling perlu mengadopsi isu terkait dengan kelintasbudayaan dan inklusi sosial. Konselor sekolah perlu memahami konteks budaya dan konteks inklusi sosial dalam rangka pemberian layanan Bimbingan dan Konseling (BK) yang komprehensif dan menjamin terpenuhinya kebutuhan khusus tiap peserta didik. Keragaman budaya dan kekhasan tiap individu harus terfasilitasi demi menunjang optimalisasi potensi peserta didik.

Untuk menghadapi tantangan memenuhi kebutuhan konseling berperspektif inklusif, guru BK perlu untuk memiliki 3 kompetensi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Furqan (Murad, 2012) yakni kompetensi pribadi, kompetensi inti dan kompetensi pendukung. Kompetensi pendukung sangat perlu dikembangkan dalam rangka merespon keberagaman peserta didik melalui adaptabilitas konselor terhadap isu-isu khusus dalam layanan BK. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perspektif inklusivitas yang ada pada pemahaman, pengetahuan dan sikap guru BK di Kalimantan Selatan. Perspektif ini berperan penting dalam mendukung konseling yang lebih berpihak pada peserta didik yang memerlukan bimbingan dan konseling.

Bimbingan dan Konseling berperspektif inklusif akan memenuhi tujuan layanan BK komprehensif. Dengan demikian layanan BK akan mampu mencapai tujuannya yakni *pertama*, agar peserta didik dapat memahami diri sehingga tergali bakat dan minatnya, *kedua*, peserta didik mampu beradaptasi dengan kegiatan pembelajaran sehingga mampu meningkatkan kompetensi dirinya dan *ketiga*, peserta didik mampu untuk belajar mengantisipasi terhadap setiap perubahan yang terjadi sehingga mampu mempersiapkan masa depannya dengan sebaik-baiknya.

## METODE

Penelitian mengenai Perspektif Inklusivitas Sosial Guru BK di Kota Banjarmasin merupakan satu bagian dari penelitian sebelumnya mengenai Kompetensi Guru BK berbasis *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI). Perspektif inklusivitas merupakan hasil angket bagian A dari penelitian sebelumnya. dalam angket peneliti telah memberikan pengantar yang menjelaskan definisi dari inklusivitas sosial. Data berbentuk skala Guttman dengan 2 alternatif jawaban ya dan tidak. Dua alternatif jawaban ya dan tidak dimaksudkan agar subjek penelitian secara tegas dapat membedakan dua hal yang sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya. Bagi peneliti, jawaban ya dan tidak menggambarkan apakah guru Bk menggunakan perspektif inklusi sosial dan jawaban tidak menunjukkan bahwa guru BK belum memiliki wawasan tersebut. Jawaban ya dan tidak bisa bermakna sebaliknya, tergantung dari apakah ketujuh item tersebut terkategori item *favorable* atau item yang *unfavorable*. Dalam hal ini, perspektif inklusivitas dibahas dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melihat persentase jawaban yang diberikan oleh keseluruhan subjek penelitian.

Instrumen pengumpulan data berupa angket yang terdiri atas tiga bagian, yakni identitas singkat subjek, skala sikap mengenai Wawasan Inklusivitas dalam Pelaksanaan Konseling dan wawancara tertulis dengan jawaban terbuka, terkait pengalaman atau pelatihan terkait inklusivitas sosial dalam layanan BK.

Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui pengiriman *link* yang memuat angket. Peneliti mengirimkan instrumen dalam bentuk pesan (*chat*) ke nomor kontak subjek atau melalui *WhatsApp Group*. Identitas subjek, data dari kuesioner dan wawancara didapatkan melalui aplikasi *google form* yang diisi oleh subjek penelitian. Penetapan jumlah subjek dilakukan secara *snowball*.

Untuk mendukung keabsahan (validitas dan reliabilitas angket) dilakukan validasi oleh dua orang ahli, yaitu satu orang dosen ULM Banjarmasin dan satu orang koordinator guru BK di SMP Katolik di Banjarmasin. Validitas dan reliabilitas angket penelitian Wawasan Inklusivitas dalam Pelaksanaan Konseling diujicobakan kepada 12 orang mahasiswa dan 11 orang guru BK di luar Kota Banjarmasin. Dari 18 items angket, didapatkan 7 items yang memenuhi validitas dan reliabilitas data. Data dianalisis melalui penghitungan persentase jawaban dari skala sikap yang telah diisi subjek dan diinterpretasikan peneliti melalui kajian teoretis.

**Tabel 1. Item Pertanyaan mengenai Wawasan Inklusivitas**

| No | Item Pernyataan  | Favorable | Unfavorable |
|----|--|-----------|-------------|
| 1  | Kelompok mayoritas tidak perlu melibatkan kelompok minoritas dalam pengambilan keputusan karena voting/suara terbanyaklah yang akhirnya dilaksanakan |           | V           |
| 2  | Perempuan dan kelompok minoritas perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan  | V         |             |
| 3  | Dalam suatu organisasi prinsip inklusi sosial perlu diterapkan agar hak setiap orang terpenuhi secara adil   | V         |             |
| 4  | Konseli perlu menyesuaikan keyakinannya dengan norma yang ada di masyarakat  |           | V           |
| 5  | inklusivitas berperan dalam pemberdayaan perempuan dan kelompok minoritas  | V         |             |
| 6  | Keyakinan personal konseli semestinya dihormati (walaupun kadang bertentangan dengan norma di masyarakat)  | V         |             |
| 7  | Jika peserta didik mengalami konflik dengan orang tua, solusi terbaik yaitu berpihak pada siapa yang benar   |           | V           |

Tabel 1 ini berisi 7 item pertanyaan valid mengenai Wawasan Inklusivitas bagi guru Bimbingan dan Konseling. Ketujuh item terbagi menjadi item yang *favorable* dan item yang *unfavorable* yang dapat dilihat rinciannya pada tabel 1.

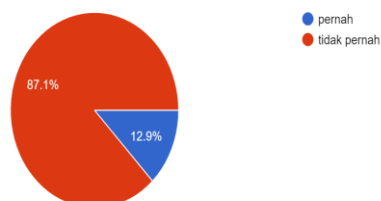
## HASIL DAN BAHASAN

### Hasil

Berdasar angket yang disebar dalam periode 25 September sampai 2 November 2021, diperoleh data dari 62 Guru BK di Kota Banjarmasin. Subjek terdiri dari, terdiri dari 9 orang guru BK berjenis kelamin laki-laki, 43 guru BK perempuan dan 10 orang tidak diketahui jenis kelaminnya (karena hanya mencantumkan inisial nama). Subjek memiliki rentang pengalaman kerja dalam rentang kurang dari satu tahun hingga lebih dari 20 tahun. Secara keseluruhan subjek berasal dari semua tingkat dan jenjang pendidikan formal, yaitu guru BK di SMP dan MTs negeri dan swasta, guru BK di SMA, MAN dan SMK negeri dan swasta dan satu orang guru BK di SD swasta di Kota Banjarmasin. Data yang didapatkan terdiri dari identitas, survei singkat tentang sosialisasi atau pelatihan terkait inklusi sosial, skala tentang BK berperspektif inklusi sosial dan data isian yang didapatkan dari wawancara tertulis.

2. Apakah Anda pernah mendapat sosialisasi atau pelatihan mengenai Bimbingan dan Konseling berbasis inklusivitas sosial?

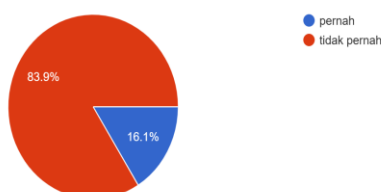
62 responses



**Gambar 1. Persentase Subjek yang Mengikuti Pelatihan Inklusi Sosial**

5. - Apakah ada lembaga atau institusi yang pernah terlibat di sekolah dalam menyosialisasikan dan mempromosikan persamaan gender dan inklusivitas di sekolah Anda?

62 responses



**Gambar 2. Kerja sama Sekolah dalam Sosialisasi dan Promosi Gender dan Inklusivitas**

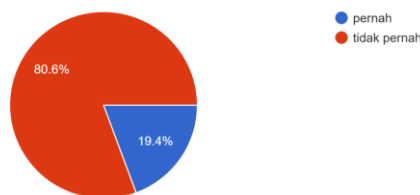
Berdasarkan data dari 62 orang guru BK di Kota Banjarmasin, sosialisasi atau pelatihan dengan tema inklusi sosial, hanya 12,9 % subjek yang menjawab “pernah”. Pihak penyelenggara berasal dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, Musyawarah Guru BK Peduli Generasi Emas dan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru BK (PPG) yang diselenggarakan di tahun 2020, secara detail dijelaskan melalui gambar 1.

Visualisasi keterlibatan sekolah dan institusi atau lembaga di luar sekolah dalam melakukan sosialisasi dan promosi mengenai persamaan gender dan inklusivitas di sekolah, dapat dilihat pada gambar 2.

Merujuk dari gambar 1 dan gambar 2, kegiatan sekolah yang melibatkan pihak luar sekolah sebanyak 16,1 %. Angka ini lebih besar dibanding diagram sebelumnya. Hal ini menunjukkan dua hal, yaitu: pertama permasalahan dan sosialisasi gender lebih dikenal dibanding permasalahan inklusi sosial dan kedua, ada keterlibatan atau program sekolah yang secara khusus bertema gender dan inklusi.

Gambar 3 mendeskripsikan data mengenai program BK yang secara khusus ditujukan untuk permasalahan gender dan inklusi sosial. Dari 62 orang guru BK di Banjarmasin, sebanyak 19,4 % atau satu per lima atau 12 sekolah telah memiliki program BK terkait permasalahan gender dan inklusivitas sosial.

6. - Apakah ada program BK yang secara khusus diarahkan untuk menyosialisasikan dan mempromosikan persamaan gender dan inklusivitas di sekolah Anda?  
62 responses



**Gambar 3 Program BK dalam Mengatasi Permasalahan Gender Dan Inklusi Sosial**

**Tabel 2. Respon 62 orang Subjek Berdasarkan Persentase Jawaban “ya” dan “tidak”**

| No | Item Pernyataan  | ya (%) | tidak (%) |
|----|--|--------|-----------|
| 1  | Kelompok mayoritas tidak perlu melibatkan kelompok minoritas dalam pengambilan keputusan karena voting/suara terbanyak lah yang akhirnya dilaksanakan (item unfavorable) | 54,8   | 45,2      |
| 2  | Perempuan dan kelompok minoritas perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan (item favorable)   | 93,5   | 6,5       |
| 3  | Dalam suatu organisasi prinsip inklusi sosial perlu diterapkan agar hak setiap orang terpenuhi secara adil (item favorable)  | 98,4   | 1,6       |
| 4  | Konseli perlu menyesuaikan keyakinannya dengan norma yang ada di masyarakat (item unfavorable)   | 87,1   | 12,9      |
| 5  | BK perlu mengedepankan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam rangka memberdayakan peserta didik perempuan dan kelompok minoritas (item favorable)           | 91,9   | 8,1       |
| 6  | Keyakinan personal konseli semestinya dihormati (walaupun kadang bertentangan dengan norma di masyarakat) (item favorable)   | 25,8   | 72,2      |
| 7  | Jika peserta didik mengalami konflik dengan orang tua, solusi terbaik yaitu berpihak pada siapa yang benar (item unfavorable)  | 25,8   | 74,2      |

Tiga situasi yang ditunjukkan pada gambar 1-3 menunjukkan bahwa persoalan gender dan inklusi sosial masih berada dalam posisi atau proporsi yang kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan guru BK yang menjadi responden penelitian. Angka ini menjadi lebih kecil lagi karena beberapa responden berasal dari sekolah yang sama.

Data kedua yang didapatkan yaitu respon subjek terkait perspektif guru BK mengenai inklusi sosial. Akumulasi respon subjek berdasarkan 7 item valid dengan dua kategori item *favorable* dan *unfavorable* yang disajikan berdasarkan persentase jawaban ya dan tidak dijelaskan pada tabel 2.

Berdasarkan 7 item pertanyaan pada tabel 2, ditemukan 4 kategori perspektif inklusivitas sosial pada guru BK di Kota Banjarmasin. **Kategori pertama** yaitu bahwa



subjek setuju dengan pelibatan, hak dan prinsip inklusi yang diberlakukan pada semua golongan, dengan mempertimbangkan kelompok minoritas. kategori ini diwakili oleh 3 item pertanyaan nomor 2, 3 dan 5. Lebih dari 90 % subjek menjawab ya untuk ketiga item *favorable*. **Kategori kedua**, yang diwakili oleh item nomor 4 (item *unfavorable*), terkait dengan keyakinan pribadi dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Subjek menekankan perlunya konseli untuk menyesuaikan nilai-nilai pribadinya dengan norma yang berlaku di masyarakat (diwakili oleh 87,1 % subjek), dan hanya 12,9 % subjek yang beranggapan bahwa subjek tidak harus memiliki kesesuaian norma dengan masyarakat. Untuk **kategori ketiga**, sebanyak 62 subjek terbagi menjadi dua kelompok berbeda pendapat dengan persentase yang hampir seimbang. Kategori perspektif inklusivitas yang ketiga ini memuat item *unfavorable* yang menyatakan bahwa: “Kelompok mayoritas tidak perlu melibatkan kelompok minoritas dalam pengambilan keputusan karena voting/suara terbanyak lah yang akhirnya dilaksanakan”. Sebanyak 54,8 % subjek setuju dengan keputusan mayoritas melalui voting dan 43,2 % tidak menyetujuinya. Pada **kategori keempat**, hampir tiga perempat subjek menyetujui atau menyatakan “ya” pada item *unfavorable* dan seperempat subjek menyatakan “tidak” pada item *favorable*. Dua item terakhir ini terkait dengan pernyataan yang bertentangan antara keyakinan pribadi dan norma (item nomor 6) dan keberpihakan pada kelompok otoritas (orang tua) atau pada kelompok marjinal (anak). Sebagai akhir dari angket, wawancara terbuka diberikan pada subjek penelitian. Peneliti memberikan satu isian berupa pernyataan terbuka yang tidak wajib diisi.

## **Bahasan**

Implementasi konsep inklusi sosial di sekolah bukan hal yang baru dan telah mendapatkan legalitas dalam berbagai peraturan dalam dunia pendidikan dalam setiap jenjangnya. Dalam kenyataannya, penerapannya terkadang terkendala dikarenakan pertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ada. Hal ini menjadi salah satu sebab mengapa konsep inklusi sosial relatif tidak dikenal atau kurang mendapat perhatian dari pengambil kebijakan di sekolah.

Pihak – pihak yang menjalin kerja sama dengan sekolah dalam kegiatan inklusi yaitu dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, Musyawarah Guru BK Peduli Generasi Emas dan didapatkan melalui Pendidikan dan Pelatihan Guru BK (PPG) yang diselenggarakan di tahun 2020. Dari semua pihak yang telah disebutkan responden, ada lima kategori institusi yang terlibat yaitu dari dinas resmi pemerintah, inisiatif atau kerja sama dari para guru BK,

pelatihan yang memang diselenggarakan secara khusus untuk peningkatan kompetensi guru BK, perkumpulan guru BK dengan misi khusus (peduli generasi emas) dan pihak penyelenggara lain yang melakukan webinar dengan tema kesetaraan gender dan inklusi sosial.

Berdasarkan kategorisasi data yang telah dibuat pada bagian hasil penelitian, maka ada 4 analisis terkait perspektif inklusi sosial guru Bk di Kota Banjarmasin. Kategori pertama yaitu permasalahan terkait pelibatan perempuan dan kelompok minoritas. Kategori kedua yaitu permasalahan yang berkenaan dengan penyesuaian konseli pada nilai di masyarakat. Kategori ketiga merupakan permasalahan mengenai pelibatan pihak minoritas dalam pengambilan keputusan. Kategori keempat memuat isu konflik antara pribadi dan kelompok dan antara pihak otoritas dengan kelompok marginal, yaitu:

#### ***Perempuan dan Kelompok Minoritas***

Keragaman latar belakang sosial dan karakter peserta didik merupakan hal yang harusnya disadari dan teramati oleh guru BK. Kesadaran akan keberagaman ini haruslah disertai dengan wawasan mengenai inklusivitas sosial yang mensyaratkan bahwa peserta didik mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan prinsip akses, kesempatan, partisipasi dan kontrol. Akses bermakna bahwa kelompok yang tereksklusi mendapatkan kesempatan untuk memperoleh sumber daya yang tersedia dan disediakan oleh lingkungannya. Kesempatan bermakna bahwa setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan diri, bekerja sama, memperoleh beasiswa, mengikuti kompetisi dan lain sebagainya. Konsep partisipasi juga berkaitan dengan hak setiap individu untuk mengambil bagian dalam tugas atau melaksanakan kewajiban yang diberlakukan bagi semua tanpa terkecuali. konsep kontrol bermakna bahwa hak setiap individu untuk memperoleh informasi dan mengetahui penggunaan anggaran atau rencana suatu kegiatan secara transparan dan terbuka bagi siapa pun yang berkepentingan dengan hal di atas.

Data menunjukkan bahwa 62 orang guru BK di Kota Banjarmasin yang menjadi subjek penelitian mayoritas memiliki wawasan yang tepat dalam penerapan prinsip inklusi sosial dalam rangka pemenuhan hak setiap orang secara adil, pelibatan perempuan dan kelompok minoritas dalam pengambilan keputusan dan meyakini bahwa penerapan inklusi sosial akan berdampak pada pemberdayaan peserta didik perempuan dan peserta didik dari kelompok minoritas. Di sisi lain, data masih menunjukkan aspek teoretis yang biasanya akan dijawab secara normatif.

Tiga data yang disajikan dengan dua pilihan dikotomis dan bersifat *favorable* membuat subjek memiliki sikap yang kuat pada salah satu dari dua alternatif jawaban. Hal ini menggambarkan aspek pengetahuan yang belum tentu mampu menjelaskan wawasan subjek yang sebenarnya. Secara normatif, ketika perempuan dan kelompok minoritas dilibatkan dalam pengambilan keputusan, hasil dari keputusan yang diperoleh belum tentu mewakili kepentingan mereka. dalam hal ini keterlibatan mereka hanya sekedar menambah jumlah suara.

Pandangan bahwa penerapan prinsip inklusif akan menjamin tercapainya pemenuhan hak setiap individu bukanlah hal yang sulit untuk dipahami atau disetujui. Pandangan ini merupakan suatu norma yang disosialisasikan, diupayakan dan perlu untuk diarusutamakan dalam praktik kehidupan. Berbekal wawasan ini maka praktik pelaksanaan kehidupan yang berprinsip inklusi sosial bisa diperkenalkan dan menjadi dasar dari praktik dalam dunia pendidikan dan layanan BK yang ada di dalamnya.

Dalam inklusi sosial, konsep kesetaraan dan keadilan gender merupakan ide yang sejalan dengan inklusi sosial. Dalam perkembangannya konsep kesetaraan gender disepadankan dengan konsep inklusi sosial. Kedua konsep ini menjadi penting dalam pelaksanaan layanan BK dikarenakan perempuan dan kelompok minoritas sering tereksklusi dikarenakan dominasi dari kelompok laki-laki yang lebih dominan dalam kultur yang mengedepankan maskulinitas.

Wawasan inklusi sosial akan mengubah pandangan BK menjadi lebih sesuai dengan kontek permasalahan lokal yang masih sangat kuat diwarnai oleh pandangan eksklusi yang memberikan *privilege* pada kelompok dominan atau mayoritas. Pandangan teori Barat yang diadopsi dalam praktik Bimbingan dan Konseling di sekolah masih mengedepankan pendekatan etik yang universal dan didominasi oleh kultur mayoritas dan subjek mayoritas yaitu tokoh atau teori yang didominasi oleh kelompok laki-laki.

Dalam konteks masyarakat, pemenuhan hak setiap orang secara adil lebih sulit dicapai, namun dalam dunia pendidikan hal tersebut lebih dapat diupayakan. Peran dan keterlibatan seluruh warga sekolah diperlukan untuk mendukung aturan atau kebijakan yang inklusif. Hal ini menyiratkan makna bahwa eksklusi sosial lebih mudah terjadi dalam tataran praktis. Dalam hal ini kompetensi pendukung berupa wawasan inklusi sosial dari guru BK sangat diperlukan dalam pemberian layanan yang mampu menjangkau kesejahteraan psikologis seluruh peserta didik.

Di sisi lain, sebagian kecil subjek memiliki pendapat yang berbeda. Enam hingga delapan persen subjek tidak menyetujui item pernyataan yang memuat kata “perempuan” dan “minoritas”. Ketidaksetujuan subjek pada item pertanyaan yang memuat kata perempuan dan minoritas dapat dimaknai sebagai pemahaman yang masih memiliki bias eksklusi sosial. Kata perempuan kadang diidentikkan pula dengan konsep gender yang, dalam realitas di masyarakat masih diperdebatkan dan dipertentangkan. Demikian juga dengan kata minoritas yang dapat dimaknai secara bias sebagai kelompok yang menyimpang dari norma atau adat kebiasaan dari kelompok mayoritas.

### ***Keyakinan Pribadi dan Nilai-nilai di Masyarakat***

Eksklusi sosial terjadi karena nilai-nilai pada masyarakat mayoritas mewarnai keyakinan pribadi. Masyarakat memiliki kekuatan untuk memaksa individu patuh atau bersikap konformis. Hal ini menjadikan suara mayoritas mendapat kesempatan untuk diwujudkan dalam berbagai kebijakan atau dalam praktik keseharian di masyarakat, atau di institusi sekolah. Eksklusi sosial merupakan bentuk dari peminggiran yang dilakukan pada kelompok minoritas, sehingga mereka tidak mendapatkan keadilan, memperoleh hambatan, pemiskinan dan sebagainya.

Pernyataan spesifik yang diajukan pada guru BK yaitu: Konseli perlu menyesuaikan keyakinannya dengan norma yang ada di masyarakat. Item ini dikategorikan sebagai item *unfavorable*. Sebanyak 87,1 % subjek menjawab “ya”. Hal ini bermakna bahwa individu taat dan tunduk pada norma di masyarakat yang belum tentu adil bagi setiap orang dan golongan. Perspektif emik tidak menjadi pilihan mayoritas responden. Dalam perspektif emik, jika keyakinan pribadi bertentangan dengan norma masyarakat yang tidak adil dan inklusif maka keyakinan pribadi boleh bertentangan dengan norma masyarakat.

Respon guru BK di Banjarmasin masih diwarnai oleh perspektif eksklusif. Tunduk pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat merupakan tindakan yang aman namun tidak memberdayakan. Respon ini muncul disebabkan juga oleh sosialisasi di masyarakat yang didominasi oleh kelompok mayoritas yang kurang peka atau peduli dengan kepentingan kelompok minoritas. Dalam hal ini, peserta didik dengan keterbatasan sumber daya yang dimilikinya dapat dikategorikan sebagai kelompok minoritas yang harus tunduk dengan nilai-nilai kelompok mayoritas yang belum tentu tepat bagi dirinya.

Guru BK sebagai bagian dari masyarakat dengan kultur dominan perlu untuk memiliki kesadaran dan wawasan alternatif dalam memandang berbagai permasalahan umum dan permasalahan spesifik yang dialami peserta didik. Mengubah nilai-nilai pribadi menjadi

lebih inklusif memerlukan wawasan baru yang mampu diterima dengan baik bukanlah proses yang singkat dan dapat dilakukan secara mandiri oleh guru BK. dalam hal ini pendidikan, tenaga kependidikan dan pendidik perlu untuk melihat konsep inklusi sosial sebagai alternatif bagi pemberdayaan diri dan peserta didik.

### ***Kelompok Minoritas dan Kelompok Mayoritas***

Pada kategori permasalahan ketiga ini, guru BK di Kota Banjarmasin memiliki dualisme pandangan. Di satu sisi kelompok pertama (54,8 %) menyatakan “ya” terhadap voting dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyiratkan makna keberpihakan pada kelompok mayoritas. Di sisi lain, 45,2 % menjawab “tidak” terkait penggunaan voting, tanpa perlu mendengar suara dari kelompok minoritas.

Respon ambigu terjadi karena ada dua hal yang muncul bersamaan namun saling bertentangan. Hal yang pertama yang harus direspon yaitu masalah voting. Voting merupakan jalan yang biasa ditempuh bila musyawarah atau negosiasi gagal dilakukan. Hal ini merupakan mekanisme umum yang terjadi dalam praktik kehidupan berdemokrasi, dan sebagian besar individu atau kelompok menyepakatinya. Hal kedua yang harus direspon yaitu frasa “tidak perlu melibatkan kelompok minoritas”. Dalam merespon ambiguitas ini, jawaban “ya” memiliki persentase lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif eksklusif masih lebih dominan pada guru BK di Banjarmasin yang menjadi subjek penelitian.

Voting secara tidak langsung mengacu pada keberpihakan pada kelompok mayoritas. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep inklusi. Kaum minoritas perlu untuk didengarkan dan difasilitasi demi menghindari persoalan yang lebih jauh yakni diskriminasi.

Respon guru BK lebih banyak mengedepankan aspek normatif dan universal yang juga terdapat dalam sistem keyakinan yang bersumber dari aspek agama dan nilai-nilai sosial umum. Dalam realitanya, tidak semua nilai-nilai masyarakat atau tafsir dari nilai keyakinan berpihak atau memertimbangkan pihak minoritas.

### ***Bias Nilai pada Keyakinan Pribadi***

Tidak setiap keyakinan pribadi dapat diwujudkan dalam perilaku. Hambatan dapat muncul karena adanya *social desirability*, suatu harapan sosial atau keinginan untuk mendapatkan penilaian yang positif dari orang lain, atau sebaliknya. Selain harapan sosial, keyakinan pribadi juga dapat mengalami bias. Bias muncul jika keyakinan pribadi tidak sekuat nilai di luar diri individu. Dalam hal ini, bias memaksa individu menjadi kelompok minoritas yang terpaksa harus tunduk pada nilai-nilai yang lebih mapan, lebih kuat dan lebih mengakar dalam sistem keyakinan kolektif.

Ketidaksetujuan subjek pada posisi keberpihakan berdasar kedudukan permasalahan menunjukkan bahwa konflik antara peserta didik dengan orang tua sebaiknya orang tua atau anak lah yang diprioritaskan, bukan pada kedudukan permasalahannya. Berdasarkan tatanan sosial di masyarakat Indonesia, maka solusi terbaik akan berasal dari orang tua.

Dalam dua situasi ketika terdapat pertentangan keyakinan, data dari guru BK di Banjarmasin menunjukkan bahwa keyakinan yang lebih kuat atau figur yang lebih dominan akan dijadikan sebagai sikap dan referensi dari tindakan. Dalam konteks konseling, keyakinan konseli harus dikalahkan jika bertentangan dengan norma yang berlaku, dan peserta didik harus tetap tunduk pada figur orang tua (tanpa mempertimbangkan pihak mana yang berada dalam posisi yang benar).

## **KESIMPULAN**

Bimbingan dan Konseling yang lahir dari peradaban Barat dan dalam kurun waktu yang lampau akan terus mengalami perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan peradaban dan nilai-nilai lokal. Bimbingan dan Konseling perlu mengadaptasi unsur-unsur multikulturalisme dikarenakan perbedaan norma dan praktik pelaksanaan yang berorientasi ke Barat dan sekuler, serta meniadakan unsur-unsur dari kelompok yang tereksklusi secara sosial. Agar layanan BK mampu mengadaptasi praktik kehidupan lokal konseli atau peserta didik, maka pertimbangan unsur emik perlu lebih dikedepankan. Guru BK sebagai konselor perlu memiliki wawasan inklusi sosial dalam rangka mendapatkan wawasan sebagai perspektif dalam pemberian layanan Bimbingan dan Konseling pada peserta didik yang memiliki beragam latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda yang sebagian diantaranya berada dalam posisi minoritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan wawasan guru BK mengenai inklusi sosial masih minim. Berdasarkan temuan penelitian beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu; perlu diadakan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dalam menjabarkan inklusi sosial yang secara konsep dan teori berbeda dengan konsep sekolah inklusi; pemberian sosialisasi, promosi dan workshop bagi guru BK yang akan memberikan manfaat signifikan bagi peningkatan kompetensi tambahan bagi guru BK; dan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan BK yang lebih mengedepankan perspektif inklusi sosial bagi peserta didik di sekolah-sekolah di Banjarmasin secara khusus dan secara umum bagi bagi peserta didik di Kalimantan Selatan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Kartadinata, S. (2011). *Arah Kebijakan Pengembangan dan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kertati, I., Harsoyo. (2020). Kerawanan Sosial dalam Perspektif Inklusif. *Jurnal Mimbar Administrasi*, 17(2), 18 – 39. <http://dx.doi.org/10.56444/mia.v17i2.1777>.
- McLeod, J. (2008). *Pengantar Konseling. Teori dan Studi Kasus*. Edisi Ketiga. A.K. Anwar (Trans). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Murad, A. (2012). Merumuskan Profil Konselor Standar. LPUISU. <https://penelitian.uisu.ac.id/arsip/217>.
- Rais, D. U. (2017). Peta Inklusi Sosial dalam Regulasi Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmi Politik*, 7(2), <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/803/772>.
- Worldbank. Retrieved June 17, 2022, from Worldbank website: <https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion>.